

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan (Wawancara)

I. Pertanyaan wawancara dengan Pengusaha pertambangan golongan C di Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:

1. Jenis bahan pertambangan yang diusahakan ?
2. Jumlah pengusaha yang dilakukan oleh masyarakat serta mulai mengadakan kegiatan ?
3. Kepemilikan tanah yang dipergunakan kegiatan usaha pertambangan?
4. Luas lahan ?
5. Tenaga kerja yang bekerja di pertambangan ?
6. Peralatan yang dipergunakan ?
7. Kemampuan produksi perorang, perhari atau perbulan ?
8. Proses produksi ?
9. Pemasarannya hasil produksi?
10. Proses perizinan dan biaya perizinan?
11. Alasan pengusaha tidak memiliki SIPD ?
12. Tindakan pemerintah daerah terhadap pengusaha non-SIPD ?
13. Jenis pungutan dan proses pembayarannya ?
14. Biaya produksi rata-rata dan harga jual ?
15. Kegiatan reklamasi pasca penambangan ?
16. Perhatian terhadap dampak lingkungan?

17. Pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam hal perizinan, bimbingan penyuluhan teknis tambang, pengawasan, tindakan hukum terhadap pelanggar ?

18. Saran dan harapan kepada Pemerintah Daerah ?

II. Pertanyaan wawancara dengan Aparat Pemda Kabupaten, meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan golongan c ?
2. Penetapan zona wilayah/kawasan pertambangan Kabupaten Tasikmalaya sesuai RUTR ?
3. Jumlah pengusaha yang tercatat ?
4. Prosedur perizinan serta bentuk pelayanan yang diberikan kepada pengusaha golongan c ?
5. Proses pemungutan pajak serta target perolehan pajak dari sub sektor pertambangan c golongan c ?
6. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD dari sub sektor pajak pertambangan golongan c ?
7. Visi, Misi dan Kebijakan Pemda terhadap pengelolaan pertambangan ?
8. Upaya dan kendala pembinaan, penertiban, serta penyuluhan yang berkaitan dengan masalah lingkungan serta sistem pengawasan ?
9. Tindakan dan penanganan Pemda terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan ?

10. Saran dan pendapatnya atas pelaksanaan otonomi daerah dalam kegiatan pertambangan ?

III. Pertanyaan wawancara dengan Aparat Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat, meliputi:

1. Kewenangan Dinas Pertambangan & Energi Propinsi Jawa Barat setelah dilaksanakannya otonomi daerah ?
2. Visi dan Misi Dinas Pertambangan & Energi Propinsi Jawa Barat dalam pengelolaan pertambangan ?
3. Keuntungan dan kerugian adanya pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pengelolaan pertambangan ?
4. Peraturan pertambangan bagi pengusaha skala kecil serta upaya peningkatan PAD bagi Kabupaten ?
5. Pengelolaan pertambangan golongan C dilihat dari fungsi-fungsi manajemen ?

IV. Pertanyaan wawancara dengan Pakar Pertambangan meliputi:

1. Implementasi peraturan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah daerah tentang pengelolaan pertambangan golongan c setelah dilaksanakannya otonomi daerah menuju kondisi good governance?
2. Keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan pertambangan golongan c ?

3. Kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pertambangan skala kecil terutama dalam hal prosedur perizinan, pengawasan, dan pengelolaan lingkungan?
4. Upaya peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
5. Masalah penegakan hukum terhadap para pelanggar Peraturan Daerah ?